

DAFTAR ISI

| | |
|---|---------|
| Catatan Redaksi..... | iii |
| Abstrak..... | v |
| Securitization on the Spread of COVID-19 in Indonesia <i>Cornelia Clara Tifany</i> | 127–142 |
| Nationalism Over Globalization Amidst COVID-19 Pandemic and Its Impact on Indonesia’s Food Security <i>Prawita Meidi Handayani</i> | 143–161 |
| Assessing the Commitment of Indonesian Government Towards Climate Change Policy: The Yudhoyono Presidency 2004-2014 <i>Lidya Christin Sinaga</i> | 163–182 |
| Potensi Ancaman Asimetris Pada <i>Returnees Foreign Fighter</i> di Indonesia <i>Taufik Akbar, Pujo Widodo, Syaiful Anwar</i> | 183–202 |
| Memahami Konsistensi Sikap Politik Negara-Negara Melanesia mengenai Isu Papua di Forum-Forum Internasional <i>Andreas Brian Bagaskoro Bayuseno, Reni Windiani</i> | 203–222 |
| Indonesia-North Korea Diplomatic Relations: Effort to Pursue National Interest and Create Regional Peace <i>Hendra Manurung</i> | 223–244 |
| Pedoman Penulisan | |

CATATAN REDAKSI

Jurnal *Politica*, yang secara spesifik membahas topik-topik yang terkait dengan isu-isu strategis di bidang politik dalam negeri maupun hubungan internasional, kembali hadir di hadapan pembaca. Untuk edisi Vol. 11 No. 2, November 2020, Jurnal *Politica* menyajikan 6 (enam) artikel yang keseluruhan topikya, baik langsung maupun tidak langsung, berkaitan dengan kepentingan nasional Indonesia.

Artikel pertama, dengan judul “Securitization on the Spread of COVID-19 in Indonesia”, ditulis oleh Cornelia Clara Tifany. Penulis membahas mengenai sikap Pemerintah Indonesia dalam mengubah isu kesehatan menjadi isu keamanan. Penulis menggunakan teori sekuritisasi sebagai kerangka analisis dengan terfokus pada komponen sekuritisasi dari Barry Buzan. Penulis juga menggunakan pendekatan tata kelola kesehatan global untuk menopang analisisnya. Sementara itu, metode penelitian kualitatif digunakan oleh penulis untuk menjelaskan permasalahan yang diangkat. Dalam simpulan, penulis mengungkapkan bahwa munculnya perubahan sikap Pemerintah Indonesia disebabkan oleh adanya tekanan dari tata kelola kesehatan global yang kemudian menunjukkan bahwa penyebaran COVID-19 di Indonesia merupakan isu keamanan.

Artikel kedua ditulis oleh Prawita Meidi Handayani dengan judul “Nationalism Over Globalization Amidst COVID-19 Pandemic and Its Impact on Indonesia’s Food Security”. Dalam tulisan ini disebutkan bahwa pada awal merebaknya wabah COVID-19, sebagian besar penyusun kebijakan berasumsi bahwa pandemi ini hanya akan memiliki dampak singkat dan terbatas hanya terhadap Cina. Namun pada kenyataannya, pandemi telah mengakibatkan guncangan global dan perlambatan ekonomi yang berpotensi menjadi resesi global. Pandemi telah memicu ketakutan terhadap orang asing dan hal itu memberikan legitimasi pada pembatasan nasional terhadap perdagangan global dan pergerakan manusia. Penulis kemudian berpandangan bahwa COVID-19 telah menjadi katalis yang dibutuhkan untuk lebih meningkatkan kebangkitan nasionalisme. Fenomena ini pada akhirnya akan berdampak negatif terhadap ketahanan pangan Indonesia.

Artikel ketiga, dengan judul “Assessing the Commitment of Indonesian Government Towards Climate Change Policy: The Yudhoyono Presidency 2004-2014”, ditulis oleh Lidya Christin Sinaga. Tulisan ini mengevaluasi kebijakan perubahan iklim di Indonesia selama masa kepresidenan Yudhoyono dengan menerapkan konteks tata kelola multi-level, yaitu dampak aktor internasional, pemerintah daerah, dan non-pemerintah dalam kebijakan lingkungan. Menurut penulis, tidak perlu diragukan bahwa pemerintahan Yudhoyono telah berusaha menangani masalah perubahan iklim dengan lebih serius daripada presiden sebelumnya. Namun, melihat minimnya komitmen dan implementasi di tingkat nasional, peran Indonesia dalam membangun rezim perubahan iklim lebih tampak sebagai upaya membangun citra internasional.

Artikel keempat ditulis bersama oleh Taufik Akbar, Pujo Widodo, dan Syaiful Anwar. Melalui tulisan yang berjudul “Potensi Ancaman Asimetris pada *Foreign Fighter Returnees* di Indonesia”, penulis mengungkapkan bahwa pasca-kekalahan *Islamic State of Iraq and Syria* (ISIS), *Foreign Fighter* yang tergabung ke dalam ISIS menyerah, dan dampaknya muncul gelombang kembalinya (*returnees*) *Foreign Fighter*, salah satu tujuannya ialah ke Indonesia. Hal tersebut memunculkan pertanyaan, bagaimana potensi ancaman yang ditimbulkan

dari *foreign fighter returnees* di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa potensi ancaman *foreign fighter returnees* di Indonesia ialah kemampuan militer *returnees*, kekuatan jaringan internasional, perpindahan wilayah perang (*darul harb*), taktik serangan *lone wolf* dan indoktrinasi ekstremisme kekerasan.

Pada artikel kelima, melalui tulisan berjudul “Memahami Konsistensi Sikap Politik Negara-negara Melanesia mengenai Isu Papua di Forum-Forum Internasional“, Andreas Brian Bagaskoro Bayuseno dan Reni Windiani, berusaha mencari jawaban mengapa negara-negara Melanesia terus-menerus membawa isu Papua dalam forum-forum internasional. Meskipun Indonesia sudah memberikan *clear statement* terkait isu Papua, namun negara-negara Melanesia tetap solid membantu Papua dan membawa isu Papua. Dengan menggunakan *Non-Western International Relations Theory* dari Ibn Khaldun, khususnya konsep *asabiyyah* dengan 3 variabel yakni kesukuan, kebutuhan atau apa yang diperjuangkan, dan agama, penelitian menemukan bahwa tindakan negara-negara Melanesia tersebut didasari pada kesatuan dan kesadaran kumpulan antara Papua dengan negara-negara Melanesia.

Pada bagian terakhir, di artikel keenam, Hendra Manurung melalui tulisan berjudul “Indonesia-North Korea Diplomatic Relations: Effort to Pursue National Interest and Create Regional Peace”, membahas kebijakan luar negeri Indonesia terhadap Korea Utara. Menurut penulis, Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo berpotensi besar untuk mampu memengaruhi perilaku Korea Utara melalui hubungan diplomatik, termasuk keputusan ofensif para pemimpin Korea Utara, khususnya terkait dengan isu pengembangan senjata nuklir. Melalui tulisan ini, penulis ingin menjelaskan, apa yang harus dan sebaiknya dilakukan Indonesia untuk membantu menciptakan perdamaian dan stabilitas di Semenanjung Korea dengan tetap berpegang pada prinsip politik luar negeri bebas dan aktif.

Demikian enam artikel yang tersaji dalam Jurnal *Politica* edisi November 2020. Kami mengucapkan terima kasih kepada para penulis dan juga Mitra Bestari yang telah berkontribusi dalam pemberian masukan terhadap artikel yang dimuat. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Seksi Editor yang telah bekerja keras membantu terselenggaranya penerbitan jurnal ini. Kami berharap keenam artikel yang tersaji dalam jurnal ini akan berguna bagi pengayaan informasi semua pihak yang membutuhkannya.

Jakarta, November 2020
Redaksi

Kata Kunci bersumber dari artikel
Lembar ini boleh dikopi tanpa izin dan biaya

Cornelia Clara Tifany

Securitization on the Spread of COVID-19 in Indonesia

Based on the World Health Organization report, Coronavirus disease 2019 (COVID-19) is an infectious respiratory disease that has become an epidemic in approximately 213 countries throughout the world, including Indonesia. Prior to the first confirmed case of COVID-19 in Indonesia, the Indonesian government's response, as represented by its high-level officials, suggested a lack of awareness. Some situations then became the turning points for the Indonesian Government, who has since focused more on dealing with the COVID-19 outbreak. Through this research, the writer aims to analyze the Indonesian Government's treatment of COVID-19 from a health issue to a security issue. Therefore, the securitization theory focusing on the component of securitization from Buzan will be employed as an analytical framework in this research. In addition, the global health governance is also used as a reference to support the writer's statement. In order to explain the action of the Indonesian Government, this research will use qualitative research with a focus on literacy observations through online news relating to the issues. In conclusion, the change in action of the Indonesian Government was caused by the pressure from GHG, which then showed that the spread of COVID-19 in Indonesia is a security issue.

Keywords: COVID-19; Health Issue; Security Issue; Securitization; Global Health Governance.

Cornelia Clara Tifany

Sekuritisasi dalam Penyebaran COVID-19 di Indonesia

Coronavirus disease (COVID-19) yang merupakan penyakit pernapasan menular telah mewabah kurang lebih di 213 negara di dunia berdasarkan pada laporan *World Health Organization*, salah satu negara yang terkena wabah adalah Indonesia. Sebelum ada konfirmasi atas kasus COVID-19 di Indonesia, terlihat sikap pihak pemerintah yang diwakili oleh pejabat tinggi menunjukkan sikap kurang perhatian. Namun beberapa situasi menjadi "turning point" bagi Pemerintah Indonesia yang kemudian memberikan fokus yang lebih dalam menghadapi wabah COVID-19 di Indonesia. Dari keadaan tersebut melalui penelitian ini, penulis menganalisis sikap Pemerintah Indonesia dalam mengubah isu kesehatan menjadi isu keamanan. Penelitian ini menggunakan teori sekuritisasi sebagai kerangka analisis dengan terfokus pada komponen sekuritisasi oleh Buzan. Di samping itu juga menggunakan tata kelola kesehatan global sebagai penopang pernyataan penulis. Agar mampu menjelaskan sikap Pemerintah Indonesia maka penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan fokus pada pengamatan literasi melalui berita daring yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat. Dalam kesimpulannya, perubahan sikap Pemerintah Indonesia disebabkan oleh adanya tekanan dari tata kelola kesehatan global yang menunjukkan bahwa penyebaran COVID-19 di Indonesia merupakan isu keamanan.

Kata kunci: COVID-19; Isu kesehatan; Isu Keamanan; Sekuritisasi; Tata Kelola Kesehatan Global.

Kata Kunci bersumber dari artikel
Lembar ini boleh dikopi tanpa izin dan biaya

Prawita Meidi Handayani

Nationalism Over Globalization Amidst COVID-19 Pandemic and Its Impact on Indonesia's Food Security

COVID-19 has posed new challenges to globalization. It further perpetuates the rising trend of nationalism that has been ongoing for quite some time. At the start of the pandemic, one will automatically point the finger to cross-border travelers and people who can perform a high transnational movement. This phenomenon further increases the rapid spread of the virus on a global scale and disrupts the global supply chain that comes with it. When the outbreak first emerged, most policymakers wrongly assumed that the COVID-19 pandemic would only have a brief, limited, China-specific impact. As a matter of fact, the pandemic is generating a global shock and economic slowdown, risking to turn for the worse into recession. This pandemic has strongly highlighted the many downsides of extensive international integration and thus provoked fears of foreigners. It later gave legitimacy to national restrictions on global trade and movement of people. As it turned out, COVID-19 is the catalyst needed to further enhance the rise of nationalism. This phenomenon will, eventually, have negative repercussions on Indonesia's food security.

Keyword: Globalization; Nationalism; COVID-19; National Interest; Food Security.

Prawita Meidi Handayani

Prioritas Nasionalisme di Atas Globalisasi di Tengah Pandemi COVID-19 dan Dampaknya Terhadap Ketahanan Pangan Indonesia

COVID-19 telah membawa tantangan baru bagi globalisasi. Tren nasionalisme yang memang telah berkembang di seluruh dunia kemudian diperburuk oleh pandemi COVID-19. Saat dimulainya pandemi, secara otomatis seseorang akan menyalahkan para pelancong lintas batas dan orang-orang yang memiliki kemampuan untuk melakukan pergerakan transnasional yang tinggi. Fenomena ini yang kemudian semakin meningkatkan penyebaran virus yang cepat dalam skala global dan gangguan pada rantai pasokan global. Pada awal merebaknya wabah COVID-19, sebagian besar penyusun kebijakan salah berasumsi bahwa pandemi ini hanya akan memiliki dampak singkat dan terbatas hanya terhadap Cina. Pada kenyataannya, pandemi ini telah mengakibatkan guncangan global dan perlambatan ekonomi yang berpotensi menjadi resesi global. Pandemi ini sangat menyoroti banyak kerugian dari integrasi internasional yang luas dan memicu ketakutan terhadap orang asing. Hal ini kemudian memberikan legitimasi pada pembatasan nasional terhadap perdagangan global dan pergerakan manusia. COVID-19 telah menjadi katalis yang dibutuhkan untuk lebih meningkatkan kebangkitan nasionalisme. Fenomena ini pada akhirnya akan berdampak negatif terhadap ketahanan pangan Indonesia.

Kata kunci: Globalisasi; Nasionalisme; COVID-19; Kepentingan Nasional; Ketahanan Pangan.

Kata Kunci bersumber dari artikel
Lembar ini boleh dikopi tanpa izin dan biaya

Lidya Christin Sinaga

Assessing the Commitment of Indonesian Government Towards Climate Change Policy: The Yudhoyono Presidency 2004-2014

As the largest archipelagic state and the world's third-largest emitter of greenhouse gases, Indonesia's commitment to climate change policy is critical. In 2009, Indonesia under President Susilo Bambang Yudhoyono showed its commitment by setting environmental targets, which included a commitment to reduce deforestation by decreasing the number of forest fires by 20 percent each year. The commitment, however, could not be fully realised. Unsurprisingly, in 2015 for the umpteenth time, a thick haze of smog caused by the forest fires blanketed Indonesia and its neighbours, Malaysia and Singapore. The pollution unavoidably raises uncertainty of Indonesia's role in advancing the climate change regime. Since 85 percent of emissions in Indonesia come from deforestation, Indonesia's failure to tackle this problem is a serious issue in relation to its international role. Indonesia's international commitment and motivation then come into questions, particularly considering the country's domestic conduct. While not dismissing the positive impacts of its active commitment, this paper evaluates climate change policy in Indonesia during the Yudhoyono administration by applying the context of multi-level governance, namely the impact of international, local government, and non-governmental actors in environmental policy. None should be in any doubt on the point that Yudhoyono has dealt with climate change issues more seriously than any previous president. However, since Indonesia falls behind on its national commitment, this paper argues that Indonesia's role in establishing climate change regime is more driven by its international stature.

Keywords: Climate Change Policy; Indonesia; Yudhoyono Presidency; Multi-level Governance; Deforestation.

Lidya Christin Sinaga

Menilai Komitmen Pemerintah Indonesia terhadap Kebijakan Perubahan Iklim: Pemerintahan Presiden Yudhoyono 2004-2014

Sebagai negara kepulauan terbesar dan penghasil emisi gas rumah kaca terbesar ketiga di dunia, komitmen Indonesia terhadap kebijakan perubahan iklim sangat penting. Pada tahun 2009, Indonesia di bawah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menunjukkan komitmennya dengan menetapkan target untuk mengurangi deforestasi dengan mengurangi jumlah kebakaran hutan sebesar 20 persen setiap tahun. Namun, target ini tidak sepenuhnya dapat diwujudkan. Pada tahun 2015 untuk yang kesekian kalinya, kabut asap tebal yang disebabkan oleh kebakaran hutan menyelimuti Indonesia dan tetangganya, Malaysia dan Singapura. Kasus ini menimbulkan ketidakpastian atas peran Indonesia dalam memajukan rezim perubahan iklim. Mengingat 85 persen emisi di Indonesia berasal dari deforestasi, kegagalan Indonesia untuk mengatasi masalah ini adalah persoalan serius terkait peran internasionalnya, apalagi dengan melihat implementasi pada tataran domestiknya. Meskipun tidak menampik dampak positif dari komitmen aktifnya, tulisan ini mengevaluasi kebijakan perubahan iklim di Indonesia selama masa kepresidenan Yudhoyono dengan menerapkan konteks tata kelola multi-level, yaitu dampak aktor internasional, pemerintah daerah, dan non-pemerintah dalam kebijakan lingkungan. Seharusnya tidak ada yang meragukan bahwa Yudhoyono telah menangani masalah perubahan iklim dengan lebih serius daripada presiden sebelumnya. Namun, melihat minimnya komitmen dan implementasi di tingkat nasional, peran Indonesia dalam membangun rezim perubahan iklim lebih tampak sebagai upaya membangun citra internasional.

Kata kunci: Kebijakan Perubahan Iklim; Indonesia; Kepresidenan Yudhoyono; Tata Kelola Multi-level; Deforestasi.

Kata Kunci bersumber dari artikel
Lembar ini boleh dikopi tanpa izin dan biaya

Taufik Akbar, Pujo Widodo, Syaiful Anwar

Potential Asymmetrical Threats from Foreign Fighter Returnees in Indonesia

After the defeat of the Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) by the attack of the United States coalition forces in Baghouz, the Foreign Fighters who joined ISIS surrendered and were captured by the Syrian Democratic Force (SDF). It resulted in a wave of returnees of Foreign Fighters, of which among the destinations was Indonesia. The return of Indonesian foreign fighters from Syria will bring potential asymmetric threats to Indonesia, which include the acts of terrorism. The main problem in this regard is the nature of the potential threat posed by these foreign fighter returnees in Indonesia, which the study seeks to analyze using a qualitative method with a phenomenological approach. The data collection was carried out through interviews and document studies, which were then analyzed with Miles, Huberman, and Saldana's analysis technique in 2014. The study employs the concept of foreign fighters and asymmetrical threats, and results of the research indicate that the potential threat of foreign fighter returnees in Indonesia comes in the ability of military returnees, an increase in international networks, movement of war zones (Darul Harb), lone wolf attack tactics and indoctrination of violent extremism.

Keywords: Threats; Foreign Fighter; ISIS; Returnees; Indonesia.

Taufik Akbar, Pujo Widodo, Syaiful Anwar

Potensi Ancaman Asimetris pada Foreign Fighter Returnees di Indonesia

Pasca kekalahan *Islamic State of Iraq and Syria* (ISIS) oleh gempuran pasukan koalisi Amerika Serikat di Baghouz, *Foreign Fighter* yang tergabung ke dalam ISIS menyerah dan tertangkap oleh pasukan *Syria Democratic Force* (SDF). Dampaknya ialah muncul gelombang kembalinya (*returnees*) *Foreign Fighter*, salah satu tujuannya ialah ke Indonesia. Kembalinya *foreign fighter* Indonesia dari Suriah akan membawa potensi ancaman asimetris bagi Indonesia seperti aksi teror. Hal tersebut memunculkan pertanyaan bagaimana potensi ancaman yang ditimbulkan dari *returnees foreign fighter* di Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bentuk potensi ancaman pada *returnees foreign fighter* di Indonesia dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan studi dokumen, selanjutnya dianalisa dengan teknik analisis Miles, Huberman dan Saldana tahun 2014. Penelitian ini menggunakan konsep *foreign fighter* dan ancaman asimetris yang hasil penelitiannya menunjukkan bahwa potensi ancaman *returnees foreign fighter* di Indonesia ialah kemampuan militer *returnees*, kekuatan jaringan internasional, perpindahan wilayah perang (*darul harb*), taktik serangan *lone wolf* dan indoktrinasi ekstremisme kekerasan.

Kata kunci: Ancaman; *Foreign Fighter*; ISIS; *Returnees*; Indonesia.

Kata Kunci bersumber dari artikel
Lembar ini boleh dikopi tanpa izin dan biaya

Andreas Brian Bagaskoro Bayuseno, Reni Windiani

Assessing the Consistency of Political Attitude and Position of Melanesian Countries on the Papua Issue in International Forums

Melanesian countries such as Vanuatu, Solomon Island, Tonga, New Caledonia, Tuvalu, Nauru, and Marshall Islands often raise the Papua human rights issue in international forums. While Indonesia has already explained and provided a clear statement about Papua, Melanesian countries remain firm in their solidarity with Papua. This research seeks to find the answer why Melanesian countries keep raising the Papua human rights issue in international forums and denouncing Indonesia. The author employs the Non-Western International Relations Theory from Ibn Khaldun, particularly on the asabiyyah concept with 3 variables -- tribe, human needs or something to fight for, and religion -- to analyze the study case. The research finds that Melanesian countries' conducts are based on the sense of unity and collective consciousness between Papua and Melanesian countries. The bond of association and religion between Papua and Melanesian people also plays a critical role in this regard. Human needs that is identified as Human Rights for the Papuan people is the shared human needs that Melanesian people fight for.

Keywords: Asabiyyah; Melanesia; Non-Western International Relations Theory; Papua's Human Rights Issues.

Andreas Brian Bagaskoro Bayuseno, Reni Windiani

Memahami Konsistensi Sikap Politik Negara-Negara Melanesia mengenai Isu Papua di Forum-Forum Internasional

Negara-negara Melanesia seperti Vanuatu, Kepulauan Solomon, Tonga, Kaledonia Baru, Tuvalu, Nauru, dan Kepulauan Marshall kerap kali membawa permasalahan HAM Papua dalam forum-forum internasional. Meskipun Indonesia sudah menjelaskan dan memberikan *clear statement* terkait isu di Papua, namun negara-negara Melanesia tetap solid untuk membantu Papua dan membawa isu Papua. Penelitian ini berusaha untuk mencari jawaban mengapa negara-negara Melanesia terus-menerus membawa isu Papua dalam forum-forum internasional dan mengecam Indonesia. Penulis menganalisis studi kasus dengan menggunakan *Non-Western International Relations Theory* dari Ibn Khaldun, khususnya konsep *asabiyyah* dengan 3 (tiga) variabel yakni kesukuan, kebutuhan atau apa yang diperjuangkan, dan agama. Penelitian ini menemukan bahwa tindakan negara-negara Melanesia tersebut didasari oleh rasa persatuan dan kesadaran kolektif antara Papua dengan negara-negara Melanesia. Adanya ikatan rasa persaudaraan dan agama antara masyarakat Papua dan Melanesia juga turut berpengaruh. Kebutuhan manusia yang diidentifikasi sebagai Hak Asasi Manusia bagi orang Papua adalah kebutuhan bersama yang diperjuangkan oleh orang Melanesia.

Kata kunci: Asabiyyah; Melanesia; Non-Western International Relations Theory; Permasalahan HAM Papua.

Kata Kunci bersumber dari artikel
Lembar ini boleh dikopi tanpa izin dan biaya

Hendra Manurung

Indonesia-North Korea Diplomatic Relations: Effort to Pursue National Interest and Create Regional Peace

This article aims to analyze the implementation of Indonesia's foreign policy towards North Korea over its approximately fifty-nine years of bilateral relations, since 17 June 1961. The arguments posited in this regard is that the implementation of Indonesia's foreign policy towards North Korea has been counterproductive. Under the leadership of President Joko Widodo, Indonesia actually has great potential to influence North Korea's conducts through the close diplomatic relations that the two countries have developed. The friendship between Indonesia and North Korea began since the two states conducted reciprocal official visits 1964 and 1965. Indonesia's foreign policy towards South Korea has often been carried out to influence the offensive decisions of North Korean leaders, especially in relation to the issue of nuclear weapon development. The key question is what should and can Indonesia do next to help create peace and stability in the Korean Peninsula by adhering to the principles of a free and active foreign policy? Why is it necessary for Indonesia to do this and how can Indonesia carry out this foreign policy towards North Korea? After becoming President since 2011, Kim Jong-un had to weaken his father's winning coalition to consolidate domestic political stability. However, North Korea's domestic market reforms have had the effect of eroding the Kim family's ideological appeal. This is relevant to the expansion of political influence from Pyongyang, which prioritizes the continuation of a fragile centralized authoritarian power while maintaining sustainable domestic economic growth.

Keywords: Indonesia; North Korea; Foreign Policy; Denuclearization; Regional Stability.

Hendra Manurung

Hubungan Diplomatik Indonesia – Korea Utara: Upaya Mewujudkan Kepentingan Nasional dan Menciptakan Perdamaian Regional

Artikel ini bertujuan menjelaskan secara analitis bagaimana implementasi kebijakan luar negeri Indonesia terhadap Korea Utara selama 59 tahun sejak 17 Juni 1961. Argumen yang ingin disampaikan terkait implementasi politik luar negeri Indonesia terhadap Korea Utara adalah kontraproduktif. Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo berpotensi besar untuk mampu memengaruhi perilaku Korea Utara melalui hubungan diplomatik. Persahabatan Indonesia dan Korea Utara dimulai sejak saling kunjung di 1964 dan 1965. Orientasi politik luar negeri Indonesia di masa lalu hingga saat ini, telah sering dilakukan untuk memengaruhi keputusan ofensif para pemimpin Korea Utara, khususnya terkait dengan isu pengembangan senjata nuklir. Pertanyaannya adalah apa yang harus dan sebaiknya dilakukan Indonesia selanjutnya untuk membantu menciptakan perdamaian dan stabilitas di Semenanjung Korea dengan tetap berpegang pada prinsip politik luar negeri bebas dan aktif? Mengapa hal tersebut perlu dilakukan oleh Indonesia dan bagaimana cara menjalankan kebijakan luar negeri terhadap Korea Utara tersebut? Kim Jong-un, setelah menjadi Presiden sejak 2011, harus melemahkan posisi koalisi pemenang ayahnya untuk konsolidasi stabilitas politik dalam negeri. Bagaimanapun, reformasi pasar domestik Korea Utara telah berdampak pada pengikisan daya tarik ideologis keluarga Kim. Hal ini relevan dengan perluasan pengaruh politik dari Pyongyang memprioritaskan pada keberlangsungan kekuatan otoriter terpusat yang rentan seiring bagaimana dapat mempertahankan pertumbuhan ekonomi dalam negeri berkelanjutan.

Kata kunci: Indonesia; Korea Utara; Kebijakan Luar Negeri; Denuklirisasi; Stabilitas Kawasan.